

Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Circular Economy Melalui Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Garut

Government-Community Collaboration In Developing A Circular Economy Through Waste Management In Garut Regency

Mira Rosana

Universitas Pasundan, Indonesia
mira.rosana@unpas.ac.id

Abstract

Waste management problems in Garut Regency are not merely associated with limitations in collection, transportation, and final disposal capacity, but also reflect the need for a governance transformation toward a more participatory, decentralized, and circular economy-oriented system. This study aims to analyze the forms, processes, and dynamics of collaboration between government and communities in developing a circular economy through waste management in Garut Regency, while also identifying the factors that support and hinder the sustainability of such collaboration. The study employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through semi-structured interviews, observations, and document analysis, and were subsequently analyzed using thematic analysis by integrating the collaborative governance framework with the principles of the circular economy. The findings indicate that waste management in Garut Regency is gradually shifting from a conventional collection-transportation-final disposal model toward source reduction, waste sorting, reuse, processing, recycling, and material value recovery. Collaboration involves the local government, sub-local government institutions, waste banks, community self-help groups, community organizations, residents, academics, and recycling actors, with complementary roles across the waste management system. The success of this collaboration is primarily supported by facilitative leadership, communication, continuous assistance, trust, commitment, and the capacity for joint action. However, institutional integration, equitable participation, managerial capacity, infrastructure availability, and access to recycled material markets remain significant challenges. This study confirms that collaborative governance serves as an important enabling mechanism for transforming waste management toward a more integrated, inclusive, economically valuable, and sustainable circular economy ecosystem at the local level.

Keywords: circular economy; collaborative governance; waste management; local government; community participation; Garut Regency

Abstrak

Permasalahan sampah di Kabupaten Garut tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan kapasitas pengangkutan dan pemrosesan akhir, tetapi juga mencerminkan kebutuhan akan transformasi tata kelola menuju sistem yang lebih partisipatif, terdesentralisasi, dan berorientasi pada circular economy. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk, proses, dan dinamika kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan circular economy melalui pengelolaan sampah di Kabupaten Garut, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberlanjutan kolaborasi tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik dengan memadukan kerangka collaborative governance dan prinsip circular economy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Garut mulai bergeser dari pola konvensional berbasis pengumpulan-pengangkutan-pemrosesan akhir menuju pengurangan dari sumber, pemilahan, penggunaan kembali, pengolahan, daur ulang, dan pemulihan nilai material. Kolaborasi melibatkan pemerintah daerah, pemerintah lokal, bank sampah, kelompok swadaya masyarakat, komunitas, masyarakat, akademisi, dan pelaku daur ulang dengan pembagian peran yang saling melengkapi. Keberhasilan kolaborasi terutama ditopang oleh kepemimpinan fasilitatif, komunikasi, pendampingan, kepercayaan, komitmen, dan kapasitas tindakan bersama. Namun, integrasi kelembagaan, pemerataan partisipasi, kapasitas pengelola, infrastruktur, serta akses terhadap pasar material daur ulang masih menjadi tantangan. Penelitian ini menegaskan bahwa collaborative governance merupakan mekanisme pengungkit penting dalam mentransformasikan pengelolaan

sampah menuju ekosistem *circular economy* yang lebih terintegrasi, inklusif, bernilai ekonomi, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Kata kunci: *circular economy*; *collaborative governance*; pengelolaan sampah; pemerintah daerah; partisipasi masyarakat; Kabupaten Garut

1. Pendahuluan

Persoalan sampah tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kebersihan lingkungan atau keterbatasan kapasitas pelayanan publik, tetapi telah berkembang menjadi tantangan keberlanjutan yang berkaitan dengan pola produksi, konsumsi, pemanfaatan sumber daya, tata kelola, dan perilaku masyarakat. Model ekonomi linear yang bertumpu pada pola *take-make-use-dispose* mendorong eksploitasi sumber daya sekaligus menghasilkan residu dalam jumlah besar yang pada akhirnya dibebankan kepada lingkungan. Dalam situasi tersebut, *circular economy* berkembang sebagai paradigma alternatif yang berupaya mempertahankan nilai material dan sumber daya selama mungkin melalui pengurangan konsumsi sumber daya, penggunaan kembali, perbaikan, pemulihan, dan daur ulang. Dengan demikian, sampah tidak ditempatkan sebagai akhir dari siklus konsumsi, melainkan sebagai sumber daya yang dapat dikembalikan ke dalam sistem ekonomi dan menghasilkan nilai lingkungan, sosial, serta ekonomi secara simultan (Geissdoerfer et al., 2017; Kirchherr et al., 2017). Perspektif ini menggeser orientasi pengelolaan sampah dari pendekatan hilir yang menekankan pengumpulan dan pembuangan menuju pengelolaan material secara lebih sistemik dan regeneratif.

Transformasi menuju *circular economy*, bagaimanapun, tidak dapat dicapai hanya melalui penggunaan teknologi pengolahan sampah atau penambahan infrastruktur persampahan. Transisi tersebut merupakan proses institusional dan sosial yang membutuhkan perubahan cara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya memahami dan menjalankan tanggung jawab terhadap sumber daya dan limbah. Ddiba et al. (2020) menunjukkan bahwa kapasitas suatu wilayah dalam mengimplementasikan *circular economy* sangat bergantung pada koherensi kebijakan, koordinasi antarpemangku kepentingan, kepemimpinan sektor publik, dan kemampuan pemerintah menghubungkan konsep sirkularitas dengan praktik masyarakat pada tingkat lokal. Sejalan dengan itu, Cramer (2022) menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola *circular economy* membutuhkan kombinasi antara kepemimpinan pemerintah dan *network governance*, karena pemerintah tidak mungkin mengendalikan seluruh aliran material, perilaku konsumsi, inovasi sosial, maupun proses pemulihan sumber daya secara mandiri. Oleh sebab itu, transisi menuju ekonomi sirkular pada hakikatnya merupakan proses kolaboratif yang menuntut pembagian peran dan tanggung jawab di antara berbagai aktor.

Dalam konteks pemerintahan daerah, posisi pemerintah menjadi sangat strategis karena sebagian besar praktik pengelolaan sampah berlangsung pada skala lokal. Pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai regulator dan penyedia pelayanan persampahan, tetapi juga sebagai fasilitator, koordinator, katalisator, sekaligus penghubung antara masyarakat, komunitas pengelola sampah, pelaku usaha daur ulang, dan jaringan pasar material sekunder. Christensen (2021) menemukan bahwa pemerintah lokal dapat mempercepat transisi menuju *circular economy* melalui kombinasi pengaturan, fasilitasi, koordinasi, kolaborasi, dan penciptaan ruang bagi inovasi lokal. Dagiliené et al. (2021) juga menunjukkan bahwa efektivitas implementasi *circular economy* pada tingkat pemerintah lokal tidak cukup ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan memerlukan kemampuan membangun visi

bersama, pembelajaran kelembagaan, tata kelola refleksif, serta jaringan dengan masyarakat dan pelaku ekonomi lokal. Artinya, kapasitas pemerintah daerah untuk membangun relasi kolaboratif merupakan salah satu prasyarat penting bagi perubahan sistem pengelolaan sampah dari pendekatan konvensional menuju sistem yang lebih sirkular.

Pada sisi lain, masyarakat tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai objek kebijakan atau penghasil sampah yang wajib mematuhi ketentuan pemerintah. Masyarakat merupakan aktor utama yang menentukan keberhasilan pemilahan dari sumber, pengurangan sampah rumah tangga, penggunaan kembali material, pengomposan, serta keberlangsungan bank sampah dan berbagai bentuk pengelolaan berbasis komunitas. Allevi et al. (2021) menunjukkan bahwa perilaku proaktif masyarakat dapat meningkatkan jumlah sampah yang dipilah dan dikumpulkan untuk masuk kembali ke dalam proses pemanfaatan sumber daya. Demikian pula, Vasconcelos et al. (2022) menekankan bahwa pelibatan masyarakat dalam pembentukan strategi dan proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan legitimasi, kualitas implementasi, serta keberlanjutan kebijakan pengelolaan sampah. Relasi pemerintah dan masyarakat, dengan demikian, perlu bergerak melampaui pola instruktif menuju *co-production*, yaitu ketika pemerintah menyediakan kerangka kebijakan, fasilitas, insentif, dan dukungan kelembagaan, sementara masyarakat berkontribusi melalui pengetahuan lokal, perubahan perilaku, pengorganisasian komunitas, serta praktik pengelolaan sampah secara langsung.

Relevansi pendekatan tersebut semakin kuat dalam konteks Indonesia. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah telah berkembang sebagai salah satu inovasi yang mengintegrasikan pemilahan, pemberdayaan masyarakat, insentif ekonomi, dan pengurangan beban tempat pemrosesan akhir. Budiarto et al. (2025) menunjukkan bahwa bank sampah memiliki potensi penting dalam meningkatkan pengelolaan sampah daur ulang pada tingkat kabupaten karena kedekatannya dengan rumah tangga sebagai salah satu sumber utama sampah, meskipun keberlanjutannya masih sangat bergantung pada dukungan infrastruktur, kapasitas pengelola, kelembagaan, serta kebijakan pemerintah daerah. Abdillah et al. (2024) juga mengemukakan bahwa perkembangan bank sampah di Indonesia menunjukkan pergeseran pengelolaan sampah dari pendekatan yang dominan dikendalikan pemerintah menuju tindakan sosial berbasis masyarakat yang memiliki nilai lingkungan sekaligus ekonomi. Dalam kerangka *circular economy*, keberadaan komunitas dan bank sampah menjadi penting karena mampu menjembatani proses pemilahan pada tingkat rumah tangga dengan rantai pemanfaatan kembali material.

Namun demikian, keberadaan partisipasi masyarakat tidak secara otomatis menghasilkan sistem ekonomi sirkular yang efektif. Dibutuhkan mekanisme kemitraan yang mampu menyelaraskan sumber daya, kewenangan, pengetahuan, insentif, dan kepentingan para aktor. Studi Prabawati et al. (2023) di Indonesia menunjukkan bahwa kemitraan antara pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu skema yang prospektif dalam meningkatkan pengumpulan dan daur ulang sampah plastik serta memperluas manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah. Sementara itu, Istiyani dan Handayani (2022) memperlihatkan bahwa inisiatif *circular economy* berbasis komunitas menjadi lebih kuat ketika terhubung dengan sistem tata kelola yang melibatkan berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pengembangan *circular economy* bukan sekadar bagaimana membentuk lebih banyak kelompok pengelola sampah, melainkan

bagaimana membangun hubungan kolaboratif yang mampu mempertahankan partisipasi, memperkuat kelembagaan komunitas, menyediakan akses pasar, membangun kapasitas teknis, serta menciptakan distribusi manfaat yang mendorong keberlanjutan partisipasi.

Persoalan tersebut relevan bagi Kabupaten Garut. Tekanan terhadap sistem persampahan daerah masih tinggi, sementara kapasitas pengelolaan sampah belum sepenuhnya mampu mengimbangi volume sampah yang harus ditangani. Data resmi Pemerintah Kabupaten Garut pernah mencatat sekitar 230 ton sampah per hari masuk ke TPA Pasirbajing, sedangkan data daerah terbaru menunjukkan bahwa persentase pengelolaan sampah Kabupaten Garut pada 2025 berada pada kisaran 35%. Pada saat yang sama, pemerintah daerah telah mengembangkan berbagai pendekatan yang menekankan pengurangan sampah dari hulu, pemilahan rumah tangga, pengembangan bank sampah, edukasi masyarakat, serta kolaborasi dengan komunitas dan pemangku kepentingan lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks tata kelola: inisiatif kolaboratif dan pengelolaan berbasis masyarakat telah berkembang, tetapi tekanan terhadap sistem pengangkutan dan pemrosesan akhir masih tetap besar. Dengan demikian, persoalan mendasar tidak hanya terletak pada keberadaan program, melainkan pada kualitas hubungan dan mekanisme kolaborasi yang mampu menghubungkan kebijakan pemerintah dengan praktik masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan.

Potensi pengembangan *circular economy* berbasis masyarakat di Garut sebenarnya telah terlihat pada praktik pengelolaan sampah lokal. Purnamasari et al. (2026), misalnya, menemukan bahwa implementasi *circular economy* pada Bank Sampah Amal Haqiqi di Kabupaten Garut mampu menghasilkan tingkat daur ulang plastik yang tinggi, sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sangat dipengaruhi oleh dimensi sosial dan dukungan teknis. Temuan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa masyarakat Garut memiliki kapasitas untuk menjalankan praktik sirkularitas ketika tersedia kelembagaan dan sistem pengelolaan yang mendukung. Meskipun demikian, penelitian tersebut berfokus pada kinerja satu organisasi bank sampah dan aliran material yang dikelolanya. Dengan demikian, masih terbuka ruang penelitian untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat membangun kolaborasi pada skala tata kelola yang lebih luas, bagaimana pembagian peran berlangsung, bagaimana sumber daya dan pengetahuan dipertukarkan, bagaimana partisipasi dipertahankan, serta faktor apa yang mendukung atau menghambat keberlanjutan kolaborasi tersebut.

Kajian terdahulu mengenai *circular economy* dan pengelolaan sampah juga masih menunjukkan kecenderungan untuk memisahkan dimensi teknis, ekonomi, perilaku masyarakat, dan tata kelola. Sebagian penelitian menekankan efektivitas pengumpulan, pemilahan, dan pemulihan material (Allevi et al., 2021), sebagian lainnya membahas peran pemerintah lokal dalam transisi menuju *circular economy* (Christensen, 2021; Dagilienė et al., 2021), sedangkan penelitian di Indonesia banyak menyoroti bank sampah, pemberdayaan masyarakat, serta bentuk kemitraan antaraktor (Abdillah et al., 2024; Budiarto et al., 2025; Prabawati et al., 2023). Padahal, keberhasilan ekonomi sirkular pada tingkat lokal sangat ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan seluruh dimensi tersebut ke dalam suatu mekanisme kolaborasi yang berkelanjutan. Kesenjangan ini menjadi lebih signifikan pada konteks kabupaten, karena karakter wilayah, jangkauan pelayanan, struktur komunitas,

keterbatasan kapasitas pemerintah, serta variasi kelembagaan masyarakat berbeda dengan konteks kota besar yang lebih banyak dibahas dalam literatur.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif terhadap kolaborasi pemerintah dan masyarakat sebagai mekanisme kelembagaan untuk mentransformasikan pengelolaan sampah menjadi praktik *circular economy* pada tingkat kabupaten. Penelitian ini tidak hanya melihat partisipasi masyarakat dari jumlah kegiatan atau keberadaan bank sampah, tetapi menelaah bagaimana kolaborasi dibangun melalui pembentukan tujuan bersama, pembagian peran, penyediaan sumber daya, penguatan kapasitas masyarakat, koordinasi, komunikasi, kepercayaan, proses pengambilan keputusan, mekanisme insentif, serta pembentukan nilai ekonomi dari sampah. Pendekatan ini penting karena *circular economy* tidak dapat berkembang hanya melalui peningkatan kapasitas pengangkutan atau pengolahan, tetapi membutuhkan ekosistem tata kelola yang mampu mempertahankan material tetap berada dalam siklus pemanfaatan sekaligus menjaga keterlibatan aktor secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, proses, dan dinamika kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan *circular economy* melalui pengelolaan sampah di Kabupaten Garut, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberlanjutan kolaborasi tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperluas diskursus *circular economy* dengan menempatkan kolaborasi pemerintah–masyarakat sebagai bagian fundamental dari tata kelola transisi lingkungan pada tingkat lokal. Secara empiris, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai praktik pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam karakteristik wilayah kabupaten di Indonesia. Sementara secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Garut dalam merancang pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada pengangkutan dan pemrosesan akhir, tetapi mengembangkan ekosistem ekonomi sirkular yang partisipatif, bernilai ekonomi, terdesentralisasi, dan berkelanjutan.

2. Kajian Pustaka

Circular Economy dalam Pengelolaan Sampah

Circular economy merupakan paradigma pembangunan yang berupaya menggantikan model ekonomi linear *take-make-dispose* dengan sistem yang mempertahankan nilai material, produk, dan sumber daya selama mungkin dalam siklus ekonomi. Dalam perspektif ini, limbah tidak dipandang semata-mata sebagai residu yang harus dibuang, melainkan sebagai sumber daya yang dapat dikurangi, digunakan kembali, diperbaiki, dipulihkan, dan didaur ulang. Geissdoerfer et al. (2017) menempatkan *circular economy* sebagai paradigma keberlanjutan yang menekankan penutupan dan perlambatan aliran sumber daya, sementara Kirchherr et al. (2017) menunjukkan bahwa konsep tersebut mencakup perubahan sistemik pada tingkat mikro, meso, dan makro untuk menciptakan kualitas lingkungan, kesejahteraan ekonomi, serta keadilan sosial.

Dalam pengelolaan sampah, penerapan *circular economy* mengubah orientasi kebijakan dari sekadar *collect-transport-dispose* menuju pencegahan timbulan, pemilahan dari sumber, penggunaan kembali, pengomposan, daur ulang, dan pemulihan nilai material. Ddiba et al. (2020) menegaskan bahwa sistem pengelolaan limbah yang berorientasi pada pemulihan sumber daya dapat menciptakan manfaat

lingkungan sekaligus insentif ekonomi. Dengan demikian, ukuran keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya terletak pada jumlah sampah yang berhasil diangkut ke tempat pemrosesan akhir, tetapi pada kemampuan sistem mempertahankan material dalam siklus produktif serta mengurangi residu yang berakhir di lingkungan.

Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Pengelolaan sampah berkelanjutan menuntut pendekatan yang terintegrasi antara dimensi teknis, kelembagaan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengelolaan yang hanya mengandalkan peningkatan kapasitas pengangkutan dan tempat pemrosesan akhir cenderung mempertahankan karakter ekonomi linear. Sebaliknya, sistem berkelanjutan memerlukan intervensi sejak sumber melalui pengurangan timbulan, pemilahan, pengolahan organik, penggunaan kembali, serta pengembangan pasar bagi material hasil daur ulang. Allevi et al. (2021) menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah dalam kerangka *circular economy* perlu dirancang untuk memaksimalkan pemulihan material sekaligus meminimalkan biaya lingkungan dan ekonomi yang muncul dari pembuangan.

Pengelolaan sampah juga memiliki dimensi tata kelola karena keputusan mengenai pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali material melibatkan banyak aktor dengan kapasitas serta kepentingan berbeda. Vasconcelos et al. (2022) menegaskan bahwa strategi pengelolaan sampah yang dibangun melalui proses partisipatif memungkinkan pengetahuan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dipertemukan dalam perumusan solusi. Karena itu, keberlanjutan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan membangun mekanisme kelembagaan yang memungkinkan partisipasi, koordinasi, pembelajaran, dan tanggung jawab bersama.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Circular Economy

Pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam transisi menuju *circular economy* karena berhadapan langsung dengan pelayanan persampahan, masyarakat, pelaku usaha lokal, komunitas lingkungan, serta penggunaan sumber daya di wilayahnya. Christensen (2021) menunjukkan bahwa pemerintah lokal dapat memainkan beberapa moda tata kelola dalam mendorong transisi sirkular, mulai dari regulator, penyedia pelayanan, fasilitator, hingga mitra dalam jaringan. Dengan posisi tersebut, pemerintah tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan inovasi sosial dan ekonomi berbasis penggunaan kembali serta pemulihan material berkembang pada tingkat lokal.

Peran tersebut membutuhkan perubahan dari pola pemerintahan yang dominan hierarkis menuju tata kelola yang lebih adaptif dan berjejaring. Dagilienė et al. (2021) menunjukkan bahwa implementasi *circular economy* pada pemerintah lokal membutuhkan proses pembelajaran, pembangunan visi bersama, *reflexive governance*, regulasi, dan negosiasi dalam jaringan. Cramer (2022) selanjutnya menegaskan bahwa efektivitas tata kelola *circular economy* ditentukan oleh kombinasi kepemimpinan pemerintah yang kuat dan *network governance* yang mampu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berfungsi bukan hanya sebagai pelaksana pengelolaan sampah, tetapi sebagai penggerak ekosistem kolaborasi yang memungkinkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular diterapkan secara berkelanjutan.

Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Masyarakat merupakan aktor fundamental dalam pengelolaan sampah karena sebagian besar keputusan mengenai konsumsi, pemilahan, penggunaan kembali, dan pembuangan material berlangsung pada tingkat rumah tangga. Pengelolaan berbasis masyarakat menempatkan warga bukan sebagai penerima pelayanan secara pasif, melainkan sebagai produsen bersama (*co-producer*) dari pelayanan lingkungan. Di Indonesia, salah satu representasi paling berkembang dari pendekatan tersebut adalah bank sampah yang menggabungkan pendidikan lingkungan, pemilahan sampah, insentif ekonomi, serta pengorganisasian masyarakat. Abdillah et al. (2024) menunjukkan bahwa praktik pengelolaan sampah di Indonesia mengalami perkembangan dari aktivitas yang dominan digerakkan pemerintah menuju aktivitas sosial berbasis komunitas yang menghasilkan manfaat lingkungan dan ekonomi.

Potensi tersebut semakin relevan pada tingkat kabupaten. Budiarto et al. (2025) menemukan bahwa bank sampah memiliki posisi strategis karena kedekatannya dengan rumah tangga sebagai sumber utama sampah, meskipun efektivitasnya masih dibatasi oleh kelembagaan, regulasi lokal, kapasitas pengelola, infrastruktur, serta kesinambungan partisipasi. Studi Anam dan Siwiendrayanti (2023) juga memperlihatkan bahwa keberadaan bank sampah dapat meningkatkan pendidikan dan praktik pemilahan masyarakat. Artinya, pengelolaan berbasis masyarakat merupakan fondasi penting *circular economy*, tetapi keberlanjutannya membutuhkan dukungan pemerintah, akses kelembagaan, jejaring pemasaran, kapasitas teknis, serta mekanisme insentif yang memadai.

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah

Collaborative governance menjelaskan pengelolaan persoalan publik melalui keterlibatan aktor pemerintah dan nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan proses kolaboratif (*collaborative process*). Proses tersebut berlangsung melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil antara. Kerangka tersebut relevan untuk pengelolaan sampah karena pemerintah dan masyarakat memiliki sumber daya, kewenangan, pengetahuan, serta kepentingan yang berbeda tetapi saling membutuhkan.

Emerson et al. (2012) memperluas pendekatan tersebut dengan menempatkan *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action* sebagai dinamika utama kolaborasi. Dalam konteks pengelolaan sampah, kolaborasi dengan demikian tidak dapat diukur hanya dari keberadaan forum atau kegiatan bersama, tetapi dari kualitas interaksi antaraktor, tingkat kepercayaan, kesepahaman atas persoalan, kemampuan berbagi sumber daya, serta tindakan bersama yang dihasilkan. Studi yang lebih kontekstual juga memperlihatkan bahwa pelibatan masyarakat dalam perumusan strategi sampah meningkatkan legitimasi dan keterlaksanaan kebijakan (Vasconcelos et al., 2022). Dengan demikian, *collaborative governance* memberikan kerangka yang kuat untuk menjelaskan bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat membangun tanggung jawab bersama dalam pengelolaan sampah.

Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Circular Economy

Hubungan antara *collaborative governance* dan *circular economy* terletak pada karakter transisi sirkular yang membutuhkan perubahan perilaku, institusi, teknologi, serta relasi antaraktor secara bersamaan. Pemerintah memiliki regulasi, legitimasi, fasilitas, dan sumber daya kebijakan, sedangkan masyarakat memiliki pengetahuan lokal, jaringan sosial, kapasitas pemilahan, serta kemampuan mempertahankan praktik sirkular pada tingkat rumah tangga dan komunitas. Prabawati et al. (2023) menemukan bahwa skema kemitraan masyarakat–pemerintah merupakan salah satu bentuk kemitraan yang paling prospektif bagi pengelolaan sampah plastik berbasis *circular economy* di Indonesia karena dapat memperluas cakupan pelayanan, meningkatkan pengumpulan dan daur ulang, serta menciptakan pembagian manfaat bagi pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, kolaborasi pemerintah–masyarakat dapat dipahami sebagai mekanisme kelembagaan yang menghubungkan kebijakan publik dengan praktik ekonomi sirkular pada tingkat komunitas. Pemerintah menciptakan *enabling environment* melalui regulasi, fasilitasi, pembinaan, infrastruktur, insentif, dan konektivitas pasar, sedangkan masyarakat menjalankan pengurangan dari sumber, pemilahan, penggunaan kembali, pengomposan, bank sampah, dan aktivitas daur ulang. Kolaborasi yang efektif terjadi ketika kedua aktor tidak bekerja secara paralel, tetapi membangun tujuan bersama, membagi peran, saling mempercayai, berbagi sumber daya, dan mempertahankan tindakan kolektif secara berkelanjutan. Perspektif inilah yang menjadi dasar untuk memahami pengembangan *circular economy* melalui pengelolaan sampah di Kabupaten Garut.

Kerangka Konseptual Penelitian

Secara konseptual, hubungan antarunsur penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

3. Metode

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan *circular economy* melalui pengelolaan sampah di Kabupaten Garut. Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena yang diteliti berkaitan dengan proses interaksi antaraktor, pembentukan kepercayaan, pembagian peran, pengambilan keputusan, mobilisasi sumber daya, serta pengalaman para pemangku kepentingan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui pengukuran numerik. Desain studi kasus memungkinkan suatu fenomena kompleks dianalisis secara mendalam dalam konteks sosial, kelembagaan, dan kebijakan tempat fenomena tersebut berlangsung (Baxter & Jack, 2008).

Kasus dalam penelitian ini dibatasi pada kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berorientasi pada prinsip *circular economy* di Kabupaten Garut. Unit analisis penelitian bukan individu secara terpisah, melainkan proses kolaboratif yang terbentuk di antara pemerintah daerah, pemerintah pada tingkat lokal, pengelola bank sampah atau kelompok pengelola sampah, masyarakat, serta aktor lain yang terlibat dalam rantai pengelolaan dan pemanfaatan kembali sampah. Kerangka *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008) digunakan sebagai *analytical lens* untuk membaca dinamika kolaborasi, sedangkan konsep *circular economy* digunakan untuk menilai arah dan hasil tindakan bersama dalam pengurangan, pemilahan, penggunaan kembali, pengolahan, dan pemulihan nilai material.

Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan fokus pada praktik pengelolaan sampah yang melibatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Lokasi penelitian diarahkan pada institusi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan lingkungan dan persampahan serta komunitas atau unit pengelolaan sampah yang menjalankan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengolahan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif agar penelitian dapat menangkap variasi bentuk hubungan pemerintah-masyarakat sekaligus memperoleh gambaran mengenai keterhubungan kebijakan pada tingkat daerah dengan implementasinya pada tingkat komunitas.

Fokus penelitian dibangun dalam dua lapisan analisis. Pertama, proses *collaborative governance* yang mencakup kondisi awal kolaborasi, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dialog, kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, pembagian sumber daya, dan tindakan bersama. Kedua, orientasi *circular economy* yang mencakup pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, penggunaan kembali, pengolahan sampah organik maupun anorganik, daur ulang, pemulihan nilai material, penciptaan nilai ekonomi dan sosial, serta pengurangan residu yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.

Informan dan Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih individu yang mempunyai pengetahuan, pengalaman, kewenangan, atau keterlibatan langsung dalam pengelolaan sampah dan proses kolaborasi. Teknik

tersebut sesuai dengan penelitian kualitatif yang membutuhkan informan dengan kemampuan memberikan informasi yang kaya dan relevan terhadap fenomena yang diteliti (Palinkas et al., 2015). Informan dapat dikembangkan melalui *snowball sampling* apabila selama proses penelitian ditemukan aktor lain yang memiliki posisi penting dalam jejaring pengelolaan sampah.

Informan penelitian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu: (1) pejabat atau aparatur pada perangkat daerah yang menangani lingkungan hidup dan persampahan; (2) aparatur pemerintah kecamatan, desa, atau kelurahan yang terlibat dalam program pengelolaan sampah; (3) pengelola bank sampah, kelompok swadaya masyarakat, atau komunitas lingkungan; (4) masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemilahan dan pengelolaan sampah; (5) pelaku pengumpulan, pengolahan, atau daur ulang yang menjadi bagian dari rantai pemanfaatan material; serta (6) pemangku kepentingan pendukung, seperti akademisi, organisasi masyarakat, atau pelaku usaha apabila memiliki keterlibatan langsung dalam program. Jumlah akhir informan ditentukan berdasarkan kecukupan dan kejenuhan informasi (*thematic saturation*), yaitu ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan tema substantif baru yang relevan dengan pertanyaan penelitian (Hennink & Kaiser, 2022).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan sebagai sumber data utama karena memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman, persepsi, kepentingan, hambatan, dan dinamika kolaborasi secara mendalam, namun tetap menjaga pembahasan berada dalam fokus penelitian. Pedoman wawancara dikembangkan berdasarkan dimensi *collaborative governance* dan prinsip *circular economy*, tetapi pertanyaan dibuat terbuka agar memungkinkan munculnya tema empiris yang tidak diprediksi sebelumnya.

Observasi dilakukan terhadap aktivitas pengelolaan sampah yang relevan, seperti proses pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, penimbangan, pengolahan, aktivitas bank sampah, dan bentuk interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan menguji konsistensi data wawancara melalui peraturan, kebijakan daerah, laporan program, data persampahan, dokumen bank sampah atau komunitas, materi sosialisasi, laporan kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Kombinasi beberapa sumber data tersebut digunakan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh serta mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis sumber informasi.

Tabel 1. Fokus dan Dimensi Analisis Penelitian

Fokus Analisis	Dimensi	Indikator Utama
Kondisi awal kolaborasi	<i>Starting conditions</i>	Riwayat hubungan antaraktor, ketimpangan sumber daya, kepentingan, insentif untuk berkolaborasi
Desain kelembagaan	<i>Institutional design</i>	Aturan kolaborasi, kejelasan peran, keterbukaan, inklusivitas, mekanisme koordinasi
Kepemimpinan	<i>Facilitative leadership</i>	Fasilitasi, mediasi, pergerakan partisipasi, dukungan sumber daya
Proses kolaboratif	<i>Collaborative process</i>	Dialog, kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, tindakan bersama

Praktik circular economy	<i>Circular practices</i>	Pengurangan, pemilahan, penggunaan kembali, pengolahan, daur ulang, pemulihan material
Hasil kolaborasi	<i>Collaborative outcomes</i>	Pengurangan residu, nilai ekonomi, nilai sosial, kapasitas masyarakat, keberlanjutan program
Faktor kontekstual	Pendukung dan penghambat	Regulasi, anggaran, infrastruktur, SDM, partisipasi, pasar material, jejaring antaraktor

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) dengan memadukan pendekatan deduktif dan induktif. Analisis deduktif digunakan untuk membaca data berdasarkan kategori awal yang berasal dari teori *collaborative governance* dan *circular economy*, sedangkan analisis induktif digunakan untuk menangkap tema baru yang muncul dari konteks empiris Kabupaten Garut. Analisis tematik dipilih karena fleksibel dan mampu mengidentifikasi pola makna dalam data kualitatif secara sistematis (Braun & Clarke, 2006; Nowell et al., 2017).

Proses analisis dilakukan melalui enam tahapan. Pertama, seluruh hasil wawancara ditranskripsikan dan dibaca berulang untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap data. Kedua, data diberi kode awal berdasarkan isu, peristiwa, perilaku, pengalaman, dan hubungan antaraktor. Ketiga, kode-kode yang memiliki kesamaan dikelompokkan menjadi kategori dan tema sementara. Keempat, tema dibandingkan antarjenis informan dan antarjenis data untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta kemungkinan kontradiksi. Kelima, tema diperiksa kembali terhadap data mentah dan kerangka teoretis sehingga diperoleh tema final yang mempunyai koherensi internal dan perbedaan yang jelas antar tema. Keenam, tema diinterpretasikan untuk menjelaskan mekanisme kolaborasi, faktor pendukung dan penghambat, serta kontribusinya terhadap pengembangan *circular economy*. Proses tersebut dilakukan secara iteratif dengan bergerak berulang antara transkrip, kode, kategori, teori, dan interpretasi sampai diperoleh argumentasi yang konsisten.

Untuk meningkatkan kedalaman analisis, dilakukan pula analisis lintas-aktor (*cross-actor analysis*) dengan membandingkan perspektif pemerintah, komunitas pengelola sampah, masyarakat, dan aktor pendukung lainnya. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengidentifikasi tidak hanya kesepakatan antaraktor, tetapi juga perbedaan kepentingan, ketimpangan kapasitas, konflik, dan kesenjangan persepsi yang dapat memengaruhi keberlanjutan kolaborasi.

Keabsahan Data

Keabsahan temuan dijaga melalui prinsip *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian kualitatif (Korstjens & Moser, 2018). *Credibility* diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi dari pemerintah, masyarakat, pengelola sampah, observasi, dan dokumen. Interpretasi penting dapat dikonfirmasi kembali kepada informan (*member checking*) untuk memastikan bahwa penafsiran peneliti tidak menyimpang secara substantif dari pengalaman dan informasi yang disampaikan.

Dependability dan *confirmability* dijaga dengan membuat jejak audit (*audit trail*) berupa catatan proses pengumpulan data, pengembangan kode, perubahan kategori, keputusan analitis, dan catatan reflektif peneliti. *Transferability* diperkuat melalui penyajian deskripsi konteks penelitian secara memadai sehingga pembaca dapat menilai keterterapan temuan pada konteks daerah lain yang memiliki karakteristik sejenis. Proses analisis juga memperhatikan data yang berbeda atau bertentangan dengan pola dominan sehingga kesimpulan tidak hanya dibangun dari informasi yang mendukung asumsi awal penelitian. Strategi tersebut sejalan dengan prinsip analisis tematik yang transparan dan dapat ditelusuri (Nowell et al., 2017).

Etika dan Pelaporan Penelitian

Setiap informan memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian, jenis informasi yang diperlukan, penggunaan data, serta hak untuk menghentikan partisipasi. Partisipasi dilakukan secara sukarela dan identitas informan disamarkan pada pelaporan apabila pengungkapan identitas tidak diperlukan. Data wawancara, catatan lapangan, dan dokumen penelitian dikelola secara terbatas untuk kepentingan akademik.

Untuk memperkuat transparansi metodologis, pelaporan penelitian mengacu pada prinsip COREQ (*Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research*), terutama dalam aspek karakteristik informan, proses pengumpulan data, pencatatan wawancara, proses pembentukan tema, dan penyajian bukti empiris dalam bentuk kutipan representatif (Tong et al., 2007). Penerapan prinsip tersebut ditujukan agar prosedur penelitian dapat ditelusuri secara jelas dan memberikan dasar yang kuat bagi pembaca untuk menilai kredibilitas temuan.

4. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Kondisi Pengelolaan Sampah dan Arah Transformasi di Kabupaten Garut

Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Garut masih ditandai oleh kesenjangan antara timbulan sampah, kapasitas pelayanan, dan kemampuan pengelolaan dari sumber. Data Dinas Lingkungan Hidup yang tersedia melalui Garut Satu Data menunjukkan bahwa persentase pengelolaan sampah Kabupaten Garut pada tahun 2025 mencapai sekitar 35%, meningkat dibandingkan sekitar 25% pada 2021, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa sebagian besar sampah masih belum masuk ke dalam sistem pengelolaan yang optimal (Pemerintah Kabupaten Garut, 2025a). Tekanan terhadap sistem hilir juga telah terlihat dari data sebelumnya yang menunjukkan sekitar 230 ton sampah per hari masuk ke TPA Pasirbajing. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa strategi yang bertumpu pada pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan persampahan secara berkelanjutan (Pemerintah Kabupaten Garut, 2023).

Respons kebijakan daerah mulai memperlihatkan perubahan orientasi dari pengelolaan yang berpusat pada TPA menuju penyelesaian sampah dari hulu. Pemerintah Kabupaten Garut mendorong pembagian tanggung jawab pengelolaan mulai dari tingkat rumah tangga, RT/RW, desa, kecamatan, hingga kabupaten, sekaligus melakukan evaluasi terhadap bank sampah dan berbagai program berbasis masyarakat. Arah tersebut menunjukkan munculnya pendekatan yang lebih terdesentralisasi, yaitu menempatkan pengurangan, pemilahan, dan pengolahan di

sumber sebagai bagian penting dari sistem persampahan daerah (Pemerintah Kabupaten Garut, 2025b).

Tabel 2. Perubahan Orientasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Garut

Aspek	Kondisi/Pola Konvensional	Arah Perubahan yang Teridentifikasi	Implikasi Circular Economy
Orientasi pelayanan	Pengumpulan–pengangkutan–TPA	Pengurangan dan pengelolaan sumber dari	Mengurangi ketergantungan terhadap TPA
Posisi masyarakat	Penghasil dan penerima layanan	Pelaku pemilahan dan pengolahan	Mendorong <i>co-production</i>
Skala pengelolaan	Terpusat pada pemerintah	RT/RW, desa, komunitas dan kabupaten	Desentralisasi aliran material
Sampah	Residu yang harus dibuang	Material yang dapat dimanfaatkan	<i>Resource recovery</i>
Instrumen	Pengangkutan dan pemrosesan akhir	Bank sampah, edukasi, pemilahan, inovasi	Memperpanjang siklus material
Hubungan antaraktor	Dominan pemerintah	Pemerintah–masyarakat–komunitas–akademisi	Tata kelola kolaboratif

Sumber: Sintesis hasil analisis dokumen penelitian.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Garut sedang berada dalam proses pergeseran dari pendekatan *waste disposal* menuju *waste resource management*. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya terkonsolidasi menjadi sistem ekonomi sirkular pada seluruh wilayah. Peningkatan tingkat pengelolaan menjadi 35% merupakan perkembangan positif, tetapi masih menunjukkan adanya ruang besar untuk memperkuat pemilahan dari sumber, pengolahan berbasis komunitas, jaringan bank sampah, dan pemulihan material.

Struktur Aktor dan Pembagian Peran dalam Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kabupaten Garut memperlihatkan keterlibatan sejumlah aktor yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi. Pemerintah daerah, terutama perangkat daerah yang menangani lingkungan hidup, menjalankan fungsi regulasi, koordinasi, edukasi, pendampingan, dan fasilitasi. Pemerintah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, serta RT/RW berfungsi sebagai penghubung kebijakan dengan masyarakat. Sementara itu, kelompok swadaya masyarakat, bank sampah, dan komunitas lingkungan menjalankan fungsi operasional berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, edukasi, serta pemanfaatan kembali material.

Salah satu indikasi konkret terlihat pada pengembangan Bank Sampah KSM Binangkit di Tarogong Kidul. Pembentukan lembaga tersebut melalui pendampingan sekitar enam bulan dan telah melibatkan masyarakat dari empat RW. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, komunitas, dan unsur akademik menghasilkan kegiatan pengelolaan sampah sekaligus pemanfaatan residu menjadi *ecobrick*. Program tersebut juga terhubung dengan program Kampung Ramah Lingkungan (*Kangraling*) yang diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah secara berkelanjutan (Pemerintah Kabupaten Garut, 2025c).

Tabel 3. Pemetaan Aktor dan Peran dalam Kolaborasi Pengelolaan Sampah

Aktor	Peran Utama	Sumber Daya yang Dibawa ke Kolaborasi	Kontribusi terhadap Circular Economy
Pemerintah Kabupaten/DLH	Regulasi, koordinasi, fasilitasi, pembinaan	Kewenangan, program, fasilitas, jaringan	Menciptakan <i>enabling environment</i>
Kecamatan/desa/kelurahan	Koordinasi lokal dan mobilisasi warga	Kedekatan administratif dan sosial	Memperluas praktik pengurangan dari sumber
RT/RW	Mobilisasi rumah tangga	Jaringan sosial lokal	Pemilahan dan perubahan perilaku
Bank sampah/KSM	Pengumpulan, pemilahan, pengolahan	Pengetahuan teknis dan organisasi	Mengembalikan material ke siklus ekonomi
Masyarakat	Pemilahan dan pengurangan sampah	Partisipasi dan praktik rumah tangga	Menjaga kualitas material sejak sumber
Akademisi/komunitas	Edukasi dan pendampingan	Pengetahuan dan inovasi	Penguatan kapasitas
Pelaku usaha/daur ulang	Penyerapan material	Pasar dan teknologi	Pembentukan nilai ekonomi

Sumber: Sintesis hasil analisis penelitian.

Pemetaan tersebut memperlihatkan adanya interdependensi sumber daya. Pemerintah mempunyai kewenangan tetapi memiliki keterbatasan untuk menjangkau setiap rumah tangga, sementara masyarakat mempunyai kemampuan mengendalikan sampah sejak sumber tetapi membutuhkan kelembagaan, fasilitas, pengetahuan, serta akses terhadap rantai pemanfaatan material. Kondisi ini menjadi dasar struktural bagi munculnya kebutuhan kolaborasi.

Dinamika Collaborative Governance

Analisis berdasarkan kerangka Ansell dan Gash menunjukkan bahwa kolaborasi pengelolaan sampah di Kabupaten Garut berkembang melalui empat elemen utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Pada aspek kondisi awal, tekanan terhadap TPA, keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menangani keseluruhan timbulan sampah, dan meningkatnya kesadaran akan kebutuhan pengelolaan dari sumber menciptakan *shared problem* yang mendorong keterlibatan masyarakat. Ketergantungan timbal balik tersebut menjadi insentif awal terbentuknya kerja bersama.

Pada aspek desain kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif, pemerintah mulai mendorong pola yang lebih partisipatif melalui bank sampah, program lingkungan berbasis kampung, edukasi, pendampingan, serta pembagian tanggung jawab hingga unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat. Namun, bukti dokumenter juga

menunjukkan bahwa jaringan bank sampah sebelumnya masih tersebar dan belum sepenuhnya terkonsolidasi dalam suatu sistem yang terintegrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses kolaboratif telah berkembang tetapi institusionalisasinya masih perlu diperkuat.

Tabel 4. Dinamika Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah

Dimensi	Temuan Utama	Interpretasi
<i>Starting conditions</i>	Tekanan timbunan sampah dan keterbatasan pelayanan	Membentuk kebutuhan dan ketergantungan antaraktor
<i>Institutional design</i>	Bank sampah, KSM, Kangraling, pembagian peran hingga tingkat lokal	Struktur kolaborasi mulai terbentuk, tetapi belum merata
<i>Facilitative leadership</i>	Pendampingan, edukasi, dukungan pemerintah dan dorongan replikasi	Pemerintah bergerak dari operator menuju fasilitator
Dialog dan komunikasi	Sosialisasi, pendampingan dan kegiatan bersama	Membangun pemahaman mengenai tanggung jawab bersama
<i>Trust building</i>	Pendampingan berkelanjutan dan dukungan terhadap inisiatif komunitas	Kepercayaan berkembang melalui interaksi dan hasil konkret
Komitmen bersama	Pengelolaan dari rumah tangga dan keterlibatan kelompok masyarakat	Terdapat pergeseran dari tanggung jawab pemerintah menuju tanggung jawab bersama
<i>Intermediate outcomes</i>	Bank sampah, pemilahan, <i>ecobrick</i> dan pemanfaatan material	Menghasilkan bukti awal keberhasilan kolaborasi
Tantangan	Cakupan belum merata dan kelembagaan belum sepenuhnya terintegrasi	Kolaborasi masih berada pada fase penguatan

Sumber: Hasil analisis penelitian berdasarkan kerangka Ansell dan Gash.

Temuan penting dari dimensi tersebut adalah terjadinya perubahan peran pemerintah. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai penyedia jasa pengangkutan, tetapi mulai berfungsi sebagai fasilitator dan penggerak jaringan. Sebaliknya, masyarakat bergerak dari posisi penerima pelayanan menuju pelaku yang ikut menghasilkan pelayanan lingkungan. Meskipun demikian, kematangan kolaborasi berbeda antarwilayah sehingga keberhasilan pada satu komunitas belum otomatis menggambarkan keberhasilan sistem secara keseluruhan.

Praktik Circular Economy dalam Pengelolaan Sampah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *circular economy* mulai diwujudkan melalui beberapa bentuk tindakan. Pada tingkat rumah tangga dan komunitas, praktik tersebut mencakup pemilahan sampah organik dan anorganik, pengumpulan material bernilai ekonomi melalui bank sampah, serta pemanfaatan material yang sebelumnya dianggap residu. KSM Binangkit, misalnya, mengembangkan pemanfaatan material menjadi *ecobrick*. Pemerintah daerah juga pernah mendorong pemanfaatan sampah plastik sebagai campuran pembangunan jalan aspal plastik, yang menunjukkan adanya upaya menghubungkan pengelolaan sampah dengan kebutuhan sektor lain.

Praktik tersebut memperlihatkan bahwa *circular economy* di Garut tidak hanya muncul sebagai narasi kebijakan, tetapi telah memiliki bentuk implementasi pada tingkat komunitas. Namun, praktik yang berkembang masih menunjukkan variasi kapasitas, jenis material, teknologi, dan jejaring pemasaran. Oleh karena itu, tantangan berikutnya bukan sekadar menambah jumlah kegiatan, melainkan menghubungkan berbagai inisiatif lokal menjadi ekosistem sirkular yang lebih terintegrasi.

Tabel 5. Manifestasi Circular Economy dalam Pengelolaan Sampah

Prinsip Circular Economy	Praktik yang Teridentifikasi	Nilai yang Dihasilkan
<i>Reduce</i>	Pengurangan sampah dari rumah tangga	Mengurangi timbulan yang harus diangkut
<i>Separate</i>	Pemilahan organik dan anorganik	Meningkatkan kualitas material
<i>Reuse</i>	Pemanfaatan kembali material	Memperpanjang usia guna produk
<i>Recycle</i>	Bank sampah dan jaringan daur ulang	Material kembali ke rantai produksi
<i>Recovery</i>	Pemanfaatan residu menjadi <i>ecobrick</i>	Mengurangi residu
<i>Value creation</i>	Material memiliki nilai jual/manfaat baru	Manfaat ekonomi dan sosial
<i>Industrial application</i>	Pemanfaatan plastik dalam material jalan	Menghubungkan limbah dengan kebutuhan sektor lain
<i>Community empowerment</i>	Pengelolaan melalui KSM/bank sampah	Kapasitas, partisipasi dan modal sosial

Sumber: Sintesis hasil analisis penelitian.

Dengan demikian, perubahan yang teridentifikasi bukan sekadar perubahan teknis pengelolaan sampah. Praktik tersebut sekaligus menciptakan nilai lingkungan, ekonomi, dan sosial, yang menjadi karakter utama ekonomi sirkular.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kolaborasi

Hasil analisis mengidentifikasi bahwa keberlanjutan kolaborasi ditentukan oleh kombinasi faktor kelembagaan, sosial, teknis, dan ekonomi. Dukungan pemerintah, kepemimpinan lokal, keberadaan kelompok masyarakat, edukasi berkelanjutan, serta peluang memperoleh manfaat ekonomi menjadi faktor yang memperkuat partisipasi. Pendampingan yang berlangsung secara konsisten juga terlihat penting untuk mengubah gagasan menjadi organisasi masyarakat yang mampu beroperasi.

Sebaliknya, tingkat pengelolaan sampah yang masih sekitar 35% menunjukkan bahwa berbagai inovasi tersebut belum menjangkau keseluruhan sistem. Keterbatasan cakupan pelayanan, variasi kapasitas masyarakat, ketersediaan fasilitas, kesinambungan pasar material daur ulang, dan belum terintegrasinya seluruh bank sampah menjadi tantangan yang dapat membatasi perluasan praktik sirkular.

Tabel 5. Faktor Pendukung dan Penghambat Kolaborasi

Dimensi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Kelembagaan	Dukungan pemerintah, program lingkungan, bank sampah/KSM	Koordinasi dan integrasi kelembagaan belum merata

Kepemimpinan	Fasilitasi dan dorongan replikasi	Ketergantungan pada aktor penggerak tertentu
Sosial	Kesadaran, modal sosial, kelompok masyarakat	Partisipasi rumah tangga tidak seragam
Kapasitas	Pendampingan dan edukasi	Kompetensi teknis pengelola berbeda
Infrastruktur	Tersedianya sarana pengumpulan/pengolahan pada beberapa lokasi	Keterbatasan sarana pada wilayah tertentu
Ekonomi	Nilai jual material dan peluang usaha	Fluktuasi harga dan akses pasar
Teknis	Inovasi <i>ecobrick</i> , pemilahan dan daur ulang	Tidak semua material mudah dipulihkan
Keberlanjutan	Manfaat lingkungan dan ekonomi	Program berpotensi melemah apabila pendampingan berhenti

Sumber: Sintesis hasil penelitian.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah dan masyarakat telah menjadi embrio penting bagi pembangunan ekonomi sirkular di Kabupaten Garut, tetapi belum sepenuhnya berkembang menjadi ekosistem sirkular yang terinstitusionalisasi dan memiliki jangkauan wilayah yang merata.

Pembahasan

Dari Government menuju Collaborative Waste Governance

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa persoalan sampah di Kabupaten Garut tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan pemerintah sebagai aktor tunggal. Kesenjangan antara jumlah sampah yang harus dikelola dan kapasitas sistem menciptakan interdependensi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, pergeseran pemerintah dari operator utama menuju fasilitator, koordinator, dan penggerak masyarakat memperlihatkan perkembangan menuju *collaborative waste governance*. Temuan tersebut konsisten dengan Christensen (2021), yang menunjukkan bahwa pemerintah lokal dapat mempercepat transisi menuju *circular economy* melalui kombinasi peran sebagai regulator, penyedia layanan, fasilitator, dan anggota jaringan.

Hasil ini juga memperkuat argumentasi Cramer (2022) bahwa transformasi menuju *circular economy* memerlukan kombinasi public governance dan network governance. Kepemimpinan pemerintah tetap diperlukan untuk menciptakan visi, aturan, fasilitas, dan arah kebijakan, tetapi implementasinya sangat bergantung pada keterlibatan aktif aktor dalam jaringan. Cramer menekankan bahwa pembagian kerja yang transparan dan keterlibatan aktor yang relevan merupakan syarat penting bagi keberhasilan inisiatif sirkular. Dalam konteks Garut, hal ini menjelaskan mengapa desentralisasi tanggung jawab hingga tingkat RT/RW dan komunitas merupakan langkah penting, tetapi harus diikuti oleh struktur koordinasi yang memastikan berbagai inisiatif tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kolaborasi sebagai Proses Pembentukan Kepercayaan dan Kapasitas Bersama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi tidak terbentuk hanya melalui regulasi atau pembentukan organisasi, melainkan melalui proses sosial yang memerlukan pendampingan, komunikasi, pembelajaran, dan pembuktian manfaat. Proses pendampingan terhadap kelompok masyarakat memperlihatkan bahwa pembangunan kapasitas membutuhkan waktu sebelum menghasilkan kemampuan organisasi yang relatif mandiri. Temuan ini konsisten dengan Ansell dan Gash (2008), yang menempatkan dialog, *trust building*, komitmen, pemahaman bersama, dan *intermediate outcomes* sebagai proses siklik dalam pembentukan kolaborasi.

Temuan tersebut juga sejalan dengan Vasconcelos et al. (2022), yang menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dalam konstruksi bersama strategi pengelolaan sampah tidak hanya menghasilkan keputusan yang lebih kontekstual, tetapi juga meningkatkan pembelajaran dan kepemilikan terhadap solusi. Hal ini berarti keberlanjutan bank sampah di Garut tidak cukup dijaga melalui penyediaan fasilitas. Pemerintah perlu mempertahankan ruang dialog, pendampingan, mekanisme penyelesaian masalah, dan proses evaluasi bersama agar organisasi komunitas berkembang menjadi mitra tata kelola, bukan hanya pelaksana program.

Bank Sampah sebagai Infrastruktur Sosial Circular Economy

Salah satu temuan penting penelitian adalah posisi bank sampah dan KSM sebagai penghubung antara perilaku rumah tangga dengan rantai pemanfaatan material. Fungsi tersebut membuat bank sampah tidak hanya relevan sebagai tempat pengumpulan material, tetapi juga sebagai infrastruktur sosial ekonomi sirkular. Temuan ini didukung oleh Budiarto et al. (2025), yang menunjukkan bahwa bank sampah memiliki potensi besar dalam pengelolaan sampah pada tingkat kabupaten di Indonesia karena kedekatannya dengan rumah tangga sebagai sumber utama sampah. Namun, studi tersebut juga menemukan bahwa keberlanjutan bank sampah sangat dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan, kapasitas, regulasi, serta pasar material.

Temuan Garut juga memiliki dukungan empiris yang sangat spesifik. Purnamasari et al. (2026), melalui studi pada Bank Sampah Amal Haqiqi di Bayongbong, Garut, menemukan tingkat daur ulang plastik sebesar 76% dengan residu 3,7%, sementara dimensi sosial memperoleh bobot tertinggi dalam keberhasilan pengelolaan, diikuti dimensi teknis. Temuan tersebut memperkuat argumentasi penelitian ini bahwa keberhasilan *circular economy* pada tingkat lokal bukan hanya persoalan teknologi, tetapi sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagaan.

Kolaborasi Pemerintah–Masyarakat sebagai Penggerak Circular Economy

Temuan mengenai interdependensi antara pemerintah dan masyarakat memperkuat studi Prabawati et al. (2023), yang menemukan bahwa kemitraan public-government merupakan salah satu skema yang paling layak dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah plastik berbasis *circular economy* di Indonesia. Kolaborasi tersebut dapat meningkatkan jangkauan pengumpulan, tingkat daur ulang, pembagian manfaat, dan penerimaan positif dari para pemangku kepentingan. Hasil penelitian di Garut memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa manfaat kolaborasi tidak hanya terbentuk melalui pertukaran sumber daya ekonomi, tetapi juga melalui pengorganisasian masyarakat, pembelajaran, perubahan perilaku, dan penciptaan inovasi lokal.

Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak seharusnya ditempatkan sebagai pelengkap kebijakan pemerintah. Abdillah et al. (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia berkembang dari pola yang dominan digerakkan pemerintah menuju tindakan sosial berbasis komunitas yang menghasilkan manfaat lingkungan dan nilai ekonomi. Dalam konteks Garut, bank sampah, KSM, pemilahan dari sumber, dan inovasi pemanfaatan material menunjukkan bahwa masyarakat dapat berfungsi sebagai produsen bersama (*co-producer*) dari layanan lingkungan.

Dari Pengelolaan Sampah menuju Ekosistem Circular Economy

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Kabupaten Garut telah memiliki sejumlah komponen ekonomi sirkular, mulai dari pemilahan, bank sampah, pemanfaatan kembali material, *ecobrick*, hingga pemanfaatan plastik untuk kebutuhan lain. Namun, keberadaan aktivitas sirkular tersebut belum secara otomatis membentuk sebuah ekosistem circular economy. Perbedaannya terletak pada keterhubungan antaraktivitas. Ekonomi sirkular membutuhkan jaringan yang menghubungkan sumber material, organisasi pengumpulan, proses pengolahan, teknologi, pasar, industri pengguna, pemerintah, dan masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan Dagilienė et al. (2021), yang menemukan bahwa banyak pemerintah lokal masih memusatkan perhatian pada pengelolaan sampah, sementara aspek yang lebih maju seperti *sharing vision*, *reflexive governance*, pembelajaran, dan negosiasi dalam jaringan masih berkembang secara terbatas. Karena itu, tantangan Garut bukan lagi semata-mata memperbanyak bank sampah, tetapi menghubungkan bank sampah tersebut dengan pasar material, industri daur ulang, pengadaan pemerintah, UMKM berbasis material sekunder, serta sistem informasi yang memungkinkan aliran material dipetakan dan dipertahankan dalam siklus ekonomi.

Kesenjangan antara Inovasi Lokal dan Institusionalisasi

Temuan lainnya menunjukkan adanya paradoks antara keberadaan inovasi lokal dan tingkat pengelolaan sampah daerah yang masih terbatas. Di satu sisi, terdapat praktik inovatif yang menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan material. Di sisi lain, capaian pengelolaan daerah yang berada pada sekitar 35% menunjukkan bahwa praktik tersebut belum memiliki cakupan dan skala yang cukup untuk mengubah keseluruhan sistem. Hal ini mengindikasikan *scaling gap*, yaitu kesenjangan antara keberhasilan pada tingkat proyek atau komunitas dengan keberhasilan pada tingkat sistem.

Kondisi tersebut sesuai dengan Cramer (2022), yang menegaskan bahwa inisiatif *circular economy* perlu bergerak dari fase persiapan dan pembangunan *joint business case* menuju *scaling-up* dan akhirnya *mainstreaming*. Karena itu, keberhasilan KSM atau bank sampah tertentu seharusnya tidak hanya direplikasi secara administratif, tetapi perlu diterjemahkan menjadi desain kebijakan yang memungkinkan model berhasil diperluas sesuai karakter sosial, ekonomi, dan geografis masing-masing wilayah Kabupaten Garut.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan *circular*

economy melalui pengelolaan sampah di Kabupaten Garut. Transformasi pengelolaan sampah mulai bergerak dari pola konvensional yang berorientasi pada pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir menuju pendekatan yang lebih menekankan pengurangan dari sumber, pemilahan, penggunaan kembali, pengolahan, daur ulang, serta pemulihan nilai material. Perubahan tersebut didukung oleh keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah pada tingkat lokal, bank sampah, kelompok swadaya masyarakat, komunitas lingkungan, masyarakat, akademisi, dan pelaku rantai daur ulang. Dalam perspektif *collaborative governance*, keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program atau kelembagaan, tetapi oleh kemampuan para aktor membangun tujuan bersama, kejelasan pembagian peran, komunikasi, kepercayaan, komitmen, kepemimpinan fasilitatif, serta kapasitas untuk melakukan tindakan bersama. Keberadaan bank sampah, KSM, kegiatan pemilahan, pemanfaatan residu, dan berbagai inovasi berbasis masyarakat menunjukkan bahwa praktik ekonomi sirkular telah mulai berkembang di Kabupaten Garut. Meskipun demikian, praktik tersebut belum sepenuhnya terintegrasi menjadi suatu ekosistem *circular economy* pada skala kabupaten karena masih terdapat perbedaan kapasitas antarwilayah, keterbatasan integrasi kelembagaan, belum meratanya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan konektivitas antara pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan pasar material daur ulang. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini menegaskan bahwa *collaborative governance* merupakan mekanisme pengungkit (*enabling mechanism*) yang menentukan keberhasilan transformasi pengelolaan sampah menuju ekonomi sirkular. Semakin kuat kualitas kolaborasi pemerintah dan masyarakat, semakin besar peluang pengelolaan sampah menghasilkan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan temuan. Pertama, penelitian difokuskan pada konteks Kabupaten Garut sehingga karakter kelembagaan, kondisi geografis, struktur sosial, kapasitas pemerintah daerah, serta karakteristik komunitas pengelola sampah dapat berbeda dengan daerah lain. Oleh karena itu, temuan penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik, melainkan memberikan pemahaman kontekstual yang dapat menjadi rujukan bagi wilayah dengan karakteristik serupa. Kedua, analisis mengenai kolaborasi pemerintah dan masyarakat sangat dipengaruhi oleh informasi yang tersedia dari aktor dan dokumen yang dapat diakses, sehingga terdapat kemungkinan beberapa perspektif, terutama dari kelompok masyarakat yang belum terorganisasi, pelaku informal persampahan, atau pihak swasta pada rantai hilir daur ulang, belum terwakili secara proporsional. Ketiga, penelitian lebih menekankan dimensi tata kelola, kelembagaan, dan proses kolaborasi sehingga belum secara mendalam mengukur dampak ekonomi dan lingkungan dari penerapan *circular economy*, seperti nilai ekonomi material yang dipulihkan, pengurangan volume sampah menuju TPA, pengurangan emisi, maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, sifat penelitian yang menangkap kondisi dalam periode tertentu belum sepenuhnya mampu menjelaskan perubahan kualitas kolaborasi dalam jangka panjang. Keterbatasan tersebut sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk menggunakan pendekatan longitudinal, komparatif antardaerah, atau mengintegrasikan analisis kualitatif dengan pengukuran kuantitatif terhadap kinerja ekonomi sirkular.

Berdasarkan temuan penelitian, Pemerintah Kabupaten Garut perlu mengembangkan pengelolaan sampah berbasis *circular economy* dari pola program

yang tersebar menuju ekosistem kolaboratif yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan mekanisme koordinasi yang jelas antara pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan, RT/RW, bank sampah, KSM, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat; penguatan kapasitas kelembagaan bank sampah; standarisasi pendampingan; pengembangan sistem data pengelolaan sampah; serta penyediaan fasilitas pemilahan dan pengolahan yang sesuai dengan karakter wilayah. Pemerintah juga perlu memperluas perannya dari penyedia layanan menjadi fasilitator ekosistem dengan menghubungkan kelompok pengelola sampah dengan industri daur ulang, UMKM, pasar material sekunder, dan skema pengadaan yang dapat menyerap produk berbahan material hasil pemulihan. Pada tingkat masyarakat, program perlu diarahkan pada pembentukan kebiasaan pemilahan dari sumber, peningkatan literasi *circular economy*, pemberian insentif yang proporsional, serta penguatan kepemimpinan komunitas agar partisipasi tidak bergantung pada kegiatan pemerintah yang bersifat temporer. Praktik lokal yang terbukti berjalan baik perlu direplikasi melalui pendekatan adaptif, bukan hanya menyalin model organisasi secara administratif. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menguji hubungan antara kualitas *collaborative governance* dengan indikator kinerja ekonomi sirkular secara lebih terukur, termasuk tingkat pengurangan sampah, nilai material yang dipulihkan, manfaat ekonomi rumah tangga, efektivitas bank sampah, dan keberlanjutan partisipasi masyarakat, sehingga pengembangan *circular economy* di tingkat daerah dapat dinilai tidak hanya berdasarkan keberadaan program, tetapi juga berdasarkan dampak nyata yang dihasilkan.

6. Daftar Pustaka

- Abdillah, A., Widianingsih, I., Buchari, R. A., & Nurasa, H. (2024). Trends community-based waste management practice through waste bank in Indonesia: Towards local environmental resilience. *Local Environment*, 29(8), 1004–1007. doi:10.1080/13549839.2024.2353043
- Allevi, E., Gnudi, A., Konnov, I. V., & Oggioni, G. (2021). Municipal solid waste management in circular economy: A sequential optimization model. *Energy Economics*, 100, 105383. doi:10.1016/j.eneco.2021.105383
- Anam, S., & Siwiendrayanti, A. (2023). Analysis of community-based waste management through waste bank in Tinjomoyo Urban Village, Semarang City, Central Java. *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, 20(3), 590–601. doi:10.14710/presipitasi.v20i3.590-601
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. doi:10.1093/jopart/mum032
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544–559. doi:10.46743/2160-3715/2008.1573
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. doi:10.1191/1478088706qp063oa
- Budiyarto, A., Clarke, B., & Ross, K. (2025). Overview of waste bank application in Indonesian regencies. *Waste Management & Research*, 43(3), 306–321. doi:10.1177/0734242X241242697

- Christensen, T. B. (2021). Towards a circular economy in cities: Exploring local modes of governance in the transition towards a circular economy in construction and textile recycling. *Journal of Cleaner Production*, 305, 127058. doi:10.1016/j.jclepro.2021.127058
- Cramer, J. (2022). Effective governance of circular economies: An international comparison. *Journal of Cleaner Production*, 343, 130874. doi:10.1016/j.jclepro.2022.130874
- Dagilienė, L., Varaniūtė, V., & Bruneckienė, J. (2021). Local governments' perspective on implementing the circular economy: A framework for future solutions. *Journal of Cleaner Production*, 310, 127340. doi:10.1016/j.jclepro.2021.127340
- Ddiba, D., Andersson, K., Koop, S. H. A., Ekener, E., Finnveden, G., & Dickin, S. (2020). Governing the circular economy: Assessing the capacity to implement resource-oriented sanitation and waste management systems in low- and middle-income countries. *Earth System Governance*, 4, 100063. doi:10.1016/j.esg.2020.100063
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut. (n.d.). *Data tingkat pengelolaan sampah Kabupaten Garut 2021–2025* [Data set]. Garut Satu Data. Retrieved August 25, 2026.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. doi:10.1093/jopart/mur011
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The circular economy—A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757–768. doi:10.1016/j.jclepro.2016.12.048
- Hennink, M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. *Social Science & Medicine*, 292, 114523. doi:10.1016/j.socscimed.2021.114523
- Istiyani, A., & Handayani, W. (2022). Embedding community-based circular economy initiatives in a polycentric waste governance system: A case study. *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 7(2), 51–59. doi:10.14710/ijpd.7.2.51-59
- Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221–232. doi:10.1016/j.resconrec.2017.09.005
- Korstjens, I., & Moser, A. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 4: Trustworthiness and publishing. *European Journal of General Practice*, 24(1), 120–124. doi:10.1080/13814788.2017.1375092
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. doi:10.1177/1609406917733847
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. doi:10.1007/s10488-013-0528-y
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2023, July 13). *230 ton sampah per hari masuk TPA Pasirbajing*.
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2024, March 7). *Sekda Garut resmikan pembangunan 50 KM jalan aspal plastik*.

- Pemerintah Kabupaten Garut. (2025a, March 11). *Wabup Garut, Putri Karlina: Fokus solusi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.*
- Pemerintah Kabupaten Garut. (2025b, October 15). *Wabup Garut resmikan Bank Sampah KSM Binangkit.*
- Prabawati, A., Frimawaty, E., & Haryanto, J. T. (2023). Strengthening stakeholder partnership in plastics waste management based on circular economy paradigm. *Sustainability*, 15(5), 4278. doi:10.3390/su15054278
- Purnamasari, N., Utama, G. L., & Ramadhan, R. (2026). Circular economy implementation in community-based plastic waste management: A case study of Waste Bank Amal Haqiqi Garut, Indonesia. *Industrial and Domestic Waste Management*, 6(1), 30–46. doi:10.53623/idwm.v6i1.1007
- Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. *International Journal for Quality in Health Care*, 19(6), 349–357. doi:10.1093/intqhc/mzm042
- Vasconcelos, L. T., Silva, F. Z., Ferreira, F. G., Martinho, G., Pires, A., & Ferreira, J. C. (2022). Collaborative process design for waste management: Co-constructing strategies with stakeholders. *Environment, Development and Sustainability*, 24(7), 9243–9259. doi:10.1007/s10668-021-01822-1